

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA ULAK KERBAU LAMA
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh :
Riky Ade Nugraha
NIM. 07011381621127**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA
ULAK KERBAU LAMA KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019**

SKRIPSI

Oleh :

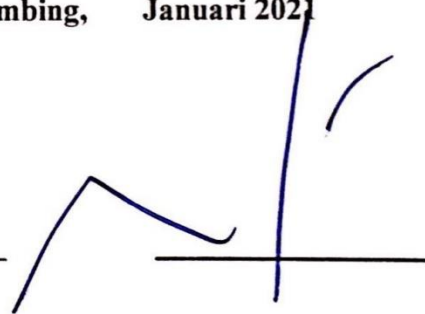
RIKY ADE NUGRAHA

07011381621127

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031000



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Januari 2021.

Indralaya, 15 Januari 2021

Ketua

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031000

Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

4. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Ketekunan sangat penting. Jangan menyerah sampai terpaksa menyerah.” (Elon Musk)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orangtuaku

Keempat kakakku dan ketiga kakak iparku

Sahabat-sahabatku

Teman Seperjuanganku terkhusus Administrasi Publik Angkatan 2016

Almamater yang menjadi kebanggaanku

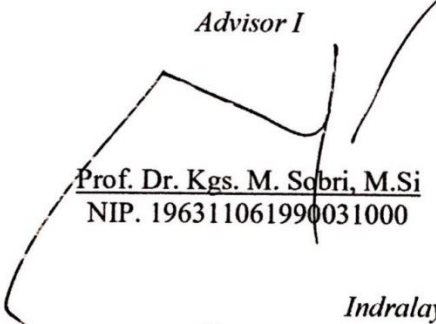
ABSTRACT

This essay has a research background such as the lack of transparency in the planning and management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) at Ulak Kerbau Lama Village in 2019. The purpose of this study was to determine the implementation of transparency in the management of APBDes at Ulak Kerbau Lama Village in 2019. The theory used in this research is Kristianten's theory of transparency, in which he argues that transparency can be measured through several indicators, namely the readiness and accessibility of documents, clarity and completeness of information, openness of processes, and a regulatory framework that ensures transparency.


This study used qualitative research methods. The results of survey based on perspective teori are: (1) Transparency that occurred at Ulak Kerbau Lama Village has going well (2) Even the people enthusiasm is still lacking because they're busy to work, in the planning and implementation of activities with regard to APBDes, the people participation is still lacking. The village head has provided a detailed archive of the Village Revenue and Expenditure Budget. The suggest are: (1) hold socialization to announce to the people about village meeting, (2) Providing archival documents related to APBDes management at the village office (3) Conducting socialization related to notification to the people that village meetings will be held, (4) make an information system through social media such as Facebook and creating a village government website.

Keywords: *Transparency, Management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes)*

Advisor I


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031000

Advisor II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, January 2021
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

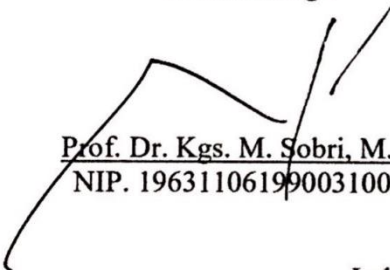
ABSTRAK

Skripsi ini memiliki latar belakang penelitian seperti kurang adanya transparansi dalam perencanaan maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama Tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Ulak Kerbau Lama Tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori transparansi Kristianten, dimana ia mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

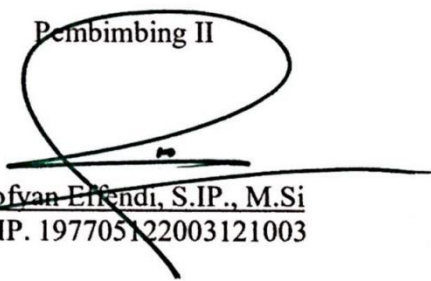
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan dilapangan dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) Transparansi yang terjadi di Desa Ulak Kerbau Lama sudah berjalan dengan baik (2) Partisipasi masyarakat sudah sangat baik, walaupun antusias warga masih kurang dikarenakan mereka sibuk bekerja, (3) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan APBDes, partisipasi masyarakat masih kurang. (4) kepala desa telah menyediakan arsip rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Saran yang diusulkan antara lain: (1) Mengadakan jadwal sosialisasi terkait informasi penggunaan APBDes ke masyarakat, (2) Menyediakan dokumen arsip terkait pengelolaan APBDes di kantor desa (3) Mengadakan sosialisasi terkait pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan musyawarah desa, (4) Menyediakan sistem pemberian informasi melalui media sosial seperti facebook serta membuat web pemerintah desa.

Kata Kunci: *Transparansi, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*

Pembimbing I


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031000

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019”** disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kendala-kendala. Namun, kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan dari kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman, baik secara moril maupun materil. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Berkat izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Kedua orang tuaku, Abu Kosim dan Partan Salam terima kasih telah memberikan semangat, do'a, kasih sayang, bimbingan yang sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Keempat kakakku beserta keluarga, Yul Ika Wijaya, Azmar Pahlefi, Trisna Mandala Putra, Yogi Chandra terima kasih untuk semangat yang tersembunyi dan do'a yang kalian panjatkan disela sholat kalian.
4. Bapak Prof. Kgs. H. M. Sobri, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nengyanti, M. Hum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi ini.
7. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama atas data dan informasi yang diberikan guna kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Administrasi Publik angkatan 2016 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu, saudara dan teman-teman sekalian senantiasa mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, Januari 2021

Riky Ade Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTO DAN PRSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
B. Pengertian Desa	9
C. Transparansi.....	10
D. Prinsip-prinsip transparansi.....	13
E. Indikator transparansi	14
F. Pengelolaan	15
G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	16
H. Anggaran.....	18
I. Anggaran sector publik.....	19
J. Penelitian terdahulu.....	21
K. Kerangka berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Definisi Konsep	24

C. Fokus Penelitian	25
D. Jenis Data dan Sumber Data	26
E. Informan Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Gambaran umum Desa Ulak Kerbau Lama.....	31
a. Lokasi dan batas wilayah administrasi.....	31
b. Potensi Desa.....	32
c. Keadaan penduduk	33
d. Sarana dan prasarana.....	33
2. Gambar struktur organisasi pemerintahan	34
3. Tugas pokok dan fungsi pemerintaha desa.....	35
a. Tugas pokok dan fungsi kepala desa.....	35
b. Tugas pokok dan fungsi perangkat desa	36
4. Gambaran Umum Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	40
5. Gambaran Umum Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	42
B. Hasil dan Pembahasan	47
1. Dimensi kesediaan dan akses dokumen.....	48
a. Adanya spanduk tentang rincian APBDes	48
b. Kepala desa menyediakan arsip APBDes	49
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi	51
a. Adanya papan pengumuman	51
b. Kepala desa menyampaikan informasi APBDes melalui BPD.....	52
3. Keterbukaan proses.....	53
a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat	53
b. Dalam proses pelaksanaan melibatkan masyarakat	55
c. Kepala desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi	56
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	57
a. Adanya pengawasan dari masyarakat dalam pembangunan desa.....	57
b. Laporan realisasi anggaran dapat diakses masyarakat	59
BAB V HASIL DAN KESIMPULAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan Anggaran dan Realisasi APBDes di tiap desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2019	5
2. Penggunaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama pada tahun 2019.....	6
3. Penelitian terdahulu	21
4. Fokus Penelitian.....	25
5. Jumlah Penduduk Desa Ulak Kerbau Lama.....	33
6. Sarana dan prasarana di Desa Ulak Kerbau Lama.....	34
7. Pendapatan Desa Ulak Kerbau Lama pada Tahun 2019	42
8. Rincian Penggunaan bidang penyelenggaraan pemerintah desa	43
9. Rincian Penggunaan bidang pembangunan desa	44
10. Rincian Penggunaan bidang kemasyarakatan desa.....	45
11. Rincian Penggunaan bidang pemberdayaan masyarakat.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. skema kerangka pemikiran.....	23
2. struktur organisasi desa.....	34
3. spanduk APBDes Desa Ulak Kerbau Lama Tahun 2019.....	49
4. spanduk rincian kegiatan	51
5. plakat rincian kegiatan.....	51
6. musyawarah pembangunan desa	54
7. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.....	56
8. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.....	56
9. masyarakat ikut memelihara hasil pembangunan.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Dosen Pembimbing	65
2. Surat Penunjuk Dosen Pembimbing	66
3. Surat Izin Penelitian	67
4. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing I.....	68
5. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing II.....	69
6. Kartu Perbaikan Proposal Skripsi.....	70
7. Kartu Bimbingan skripsi Dosen Pembimbing I.....	74
8. Kartu Bimbingan skripsi Dosen Pembimbing II	75
9. Kartu Perbaikan Skripsi.....	76
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.....	80
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	90
12. Peraturan Desa Ulak Kerbau Lama Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.....	125
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ulak Kerbau Lama Tahun Anggaran 2019	130
14. Daftar hadir Musyawarah Rancangan APBDes Tahun 2019.....	151

DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADD	: Alokasi Dana Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
KAUR	: Kepala Urusan
KKN	: Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERDES	: Peraturan Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Wilayah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki luas wilayah terbesar di dunia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.913.578,68 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia maka tentu saja hal tersebut menimbulkan keberagaman budaya dan etnis sehingga harus dijaga. Pada era reformasi tahun 1998, pemerintah mengeluarkan peraturan otonomi daerah yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Serta Berimbang antara Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan dimulai dari desa yaitu tingkat terkecil dari pelaksana pemerintahan dan juga menjadi ujung tombak dari sebuah pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan tujuan tersebut maka pemerintah perlu untuk menciptakan sebuah sistem yang saling berkaitan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, ekonomi daerah menjadi jawaban yang paling logis sebagai wadah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa. Dan juga melalui otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasaran

desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Kondisi masyarakat desa sekarang ini perlu perubahan yang mendasar agar segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat kehidupannya mengalami kesenjangan sosial seiring dengan gencarnya otonomi desa, Regulasi tentang desa tidak hanya mengatur tentang pemerintah desa baik itu kepala desa, perangkat desa ataupun BPD tetapi bagaimana implementasi dari tugas pokok dan fungsi untuk pembangunan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di desa tidak hanya di beri pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi dan organisasinya tetapi perlu didukung dalam segi dana untuk operasional kegiatan baik itu dari pemerintah desa melalui program Dana Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain, mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, monitoring dan evaluasi Dana Desa serta roadmap Dana Desa. Selain Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016. Pengalokasian Dana Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, Kewenangan pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya menjadi leluasa, Termasuk juga kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa disusun dalam suatu Anggaran dan Pendapatan

Belanja Desa atau biasa disingkat dengan sebutan APBDes. APBDes ialah Anggaran berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dalam sebuah negara yang demokrasi, pemerintah merupakan amanat dari rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan *blue print* kebenaran negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi, tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib untuk mengelola keuangan desa secara transparan (terbuka), akuntabel dan partisipatif. Dimana transparan berarti terbuka dan jujur kepada masyarakat, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, maupun terhadap seluruh lapisan masyarakat dan yang terakhir adalah partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Dengan banyaknya tahapan kegiatan tersebut tentu saja pemerintah desa harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam membuat keputusan di setiap program pembangunannya. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan yang ada di Desa Ulak Kerbau Lama, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Maka dari itu, pemerintah desa harus bersikap transparan terkait pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual, dan informasi tersebut akan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan tindakan korupsi.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, diperlukan proses penganggaran yang baik. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang rancangan beserta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tiap desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019.

Tabel 1. Rancangan Anggaran dan Realisasi APBDes di tiap desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2019

No	Nama Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
1	Belanti	1,566,347,000	1,530,311,000	36,036,000
2	Ulak Kerbau Lama	1,547,521,000	1,511,740,000	35,781,000
3	Seri Dalam	1,324,064,000	1,288,996,000	35,068,000
4	Siring Alam	1,306,886,000	1,271,854,000	35,032,000
5	Tanjung Harapan	1,290,270,000	1,255,448,000	34,822,000
6	Talang Balai Lama	1,286,653,000	1,251,710,000	34,943,000
7	Tanjung Raja Selatan	1,279,936,000	1,244,478,000	35,458,000
8	Tanjung Temiang	1,276,130,500	1,241,099,500	35,031,000
9	Talang Balai Baru I	1,254,113,000	1,219,426,000	34,687,000
10	Skonjing	1,253,836,000	1,219,303,000	34,533,000
11	Ulak Kerbau Baru	1,246,516,000	1,212,180,000	34,336,000
12	Suka Pindah	1,219,211,000	1,185,336,000	33,875,000
13	Talang Balai Baru II	1,205,757,000	1,171,877,000	33,880,000
14	Tanjung Agas	1,188,220,000	1,154,744,000	33,476,000
15	Kerinjing	1,180,191,000	1,146,810,000	33,381,000

Sumber : Kantor Camat Tanjung Raja.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang memiliki jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling tinggi yaitu Desa Belanti sebesar Rp 1,566,347,000 dan realisasinya sebesar Rp 1,530,311,000. Dan yang terbesar kedua yaitu Desa Ulak Kerbau Lama dengan dana APBDes sebesar Rp.1,547,521,000 dan realisasinya Rp. 1,511,740,000. Dapat dilihat bahwa selisih jumlah anggaran antara Desa Belanti dan Ulak Kerbau Lama hanya sebesar Rp. 18,826,000. Sedangkan desa yang memiliki jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling rendah yaitu Desa Kerinjing, dengan anggaran sebesar Rp. 1,180,191,000 dengan realisasinya yaitu Rp. 1,146,810,000.

Adapun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019 yang mana menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggunaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama pada tahun 2019

No	Bidang Kegiatan	Jumlah (dalam Rupiah)	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	353,025,000	95%
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	948,215,000	100%
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	64,750,000	100%
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	134,932,000	85%
5	Pembiayaan	10,818,000	100%
Total		1,511,740,000	

Sumber: rekap desa penyaluran dan penggunaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama tahun 2019

Dilihat dari tabel 2 dapat dikatakan bahwa bidang kegiatan pembangunan desa memiliki jumlah anggaran yang paling besar daripada bidang kegiatan lainnya dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.948,215,000-, dan telah digunakan 100% dari dana yang diperoleh. Adapun pelaksanaan pembangunannya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kawasan permukiman, dan perhubungan / komunikasi. Adapun bidang penyelenggaran pemerintah desa menggunakan APBDes sebesar Rp. 353,025,000-, dan telah digunakan 95% dari dana yang diperoleh. Yang mana digunakan untuk belanja pegawai (aparatur desa), Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 64,750,000-, dan telah digunakan 100% dari dana yang diperoleh yang meliputi kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Kebudayaan dan Keagamaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Kelembagaan Masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 134,932,000-, adapun kegiatan yang termasuk di dalam anggaran ini adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Perdagangan dan Perindustrian, dan telah digunakan 85% dari dana yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu pembiayaan, dengan anggaran sebesar Rp. 10,818,000-, dan telah digunakan 100%.

Alasan peneliti memilih Desa Ulak Kerbau Lama karena masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama. Alasan lainnya yaitu Desa Ulak Kerbau Lama merupakan desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tertinggi kedua diantara desa lainnya dan juga jumlah penduduk di Desa Ulak Kerbau lama cukup sedikit Jika dibandingkan dengan desa lain yang memiliki jumlah anggaran APBDes yang lebih rendah. Adapun jumlah penduduk Desa Ulak Kerbau lama yaitu 2.201 jiwa dengan luas wilayah $\pm 5,00 \text{ Km}^2$. Dengan anggaran yang tinggi dan juga kepadatan penduduk yang cukup rendah maka perlu untuk dilakukan penelitian terkait pengelolaan APBDes di Desa Ulak Kerbau lama. Kurangnya sosialisasi dan masih belum maksimalnya informasi mengenai pengelolaan APBDes dari Pemerintah Desa membuat masyarakat banyak yang belum mengetahui kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat apa saja yang dananya berasal dari APBDes. Dan juga mengingat masih rendahnya pengetahuan aparat yang berwenang dalam mengelola APBDes, mereka belum sepenuhnya mengerti bagaimana tata kelola keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan pelatihan khusus bagi aparatur desa yang mengelola APBDes guna untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih dari korupsi. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah Desa Ulak Kerbau Lama tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah mengenai seberapa tinggi tingkat transparansi

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat transparansi pengelolaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama Tahun 2019. Dan juga mampu menjadi bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang lebih relevan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak yang mengelola APBDes Desa Ulak Kerbau lama untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan desa. Di dalam penelitian ini akan di paparkan mengenai tingkat transparansi pengelolaan APBDes di Desa Ulak Kerbau lama.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, 2008, *Konsep dan Definisi Konseptual*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bintarto, R. Dr.1983. *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Yogyakarta. Andi.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi(Ed). 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Meutiah Ganie, Rochman. 2000. *Good Governance: Perubahan Pemerintahan*.
- Ndraha,Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rusdianto. 2006. *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Ruslan, Rusady. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sonny Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudjana.2002. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.